

**MEMPERLUAS AKSES INKLUSIF: PERAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMBERIKAN AKSES BAGI ANAK-ANAK DENGAN
KEBUTUHAN KHUSUS**

Rokhmah Dwi Wahyuningsih, Syahmidi

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: rokhmahdwiwn@gmail.com

Abstract

This article delves deeply into the role of the Central Kalimantan Provincial Education Office in providing inclusive and quality education access for children with special needs. Special education plays a very important role in ensuring that all children, regardless of their abilities or the challenges they face, can access appropriate and adequate education. Through various programs and policies that have been implemented, the Education Office strives to reduce discrimination and increase the participation of children with disabilities in the educational environment. This study uses a descriptive research approach. The results of the study indicate significant progress in educational access for children with special needs; however, there are still challenges that need to be addressed, such as the lack of adequate resources and the need for better training for teachers so they can provide optimal support. By addressing these challenges, it is expected that inclusive education can be realized more effectively in Central Kalimantan.

Keywords: Special Education, Inclusive Access, Children with Special Needs

Abstrak

Artikel ini membahas secara mendalam peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan khusus memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang kemampuan atau tantangan yang mereka hadapi, dapat mengakses pendidikan yang sesuai dan memadai. Melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan, Dinas Pendidikan berupaya keras untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan partisipasi anak-anak penyandang disabilitas dalam lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya yang memadai dan kebutuhan pelatihan yang lebih baik bagi para guru agar mereka dapat memberikan dukungan yang optimal. Dengan menangani tantangan ini, diharapkan pendidikan inklusif dapat terwujud dengan lebih efektif di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Pendidikan Khusus, Akses Inklusif, Anak dengan Kebutuhan Khusus

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 550
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus (dulu di sebut sebagai anak luar biasa) didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna (Hallahan dan Kauffman, 2003: 12). Anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki ciri-ciri perkembangan psikis ataupun fisik dengan rata-rata anak seusianya. Namun meskipun berbeda, ada juga anak-anak berkebutuhan khusus menunjukkan ketidakmampuan emosi, mental, atau fisiknya pada lingkungan sosial. Terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang seringkali kita temui yaitu tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, autisme, down syndrome, dan retardasi mental (kemunduran mental).

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, di banyak daerah, termasuk Kalimantan Tengah, akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung dan merangsang potensi mereka. Meskipun ada kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kekurangan sumber daya, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengelola pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan khusus berperan dalam menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi anak-anak tersebut. Dengan memahami tantangan dan keberhasilan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan pendidikan inklusif di Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam studi ini untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang peran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pendidikan khusus dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang relevan melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan dan program Pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan akses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus merupakan pilar strategis untuk memastikan pendidikan yang adil dan berkualitas. Sejalan dengan mandat nasional dan komitmen global terhadap pendidikan inklusif, dinas pendidikan provinsi memiliki peran kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta advokasi kebijakan yang menjamin akomodasi yang layak, layanan intervensi dini, dan keberlanjutan dukungan di satuan pendidikan. Artikel ini mengelaborasi peran institusional, strategi implementasi, serta rekomendasi penguatan tata kelola untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di Kalimantan Tengah.

Kerangka Kebijakan dan Mandat Kerangka normatif di Indonesia menempatkan pendidikan inklusif sebagai hak asasi dan layanan publik wajib. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk kewajiban penyediaan akomodasi yang layak dan layanan pendukung. Complementary, rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 menempatkan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan inklusif sebagai prioritas nasional. Di tingkat global, UNESCO (2020) menekankan transformasi sistemik melalui pendanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kapasitas guru, dan data terdisagregasi. Kerangka ini menjadi landasan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun kebijakan operasional yang responsif konteks lokal.

Peran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi (Bidang Pendidikan Khusus)

- **Perencanaan Berbasis Data:** Mengembangkan pemetaan kebutuhan PDBK lintas kabupaten/kota (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autisme, ADHD, kesulitan belajar spesifik) dengan data terdisagregasi usia, gender, dan lokasi. Data menjadi dasar penentuan zonasi layanan, penempatan guru pendamping khusus (GPK), serta pengadaan alat bantu.
- **Penguatan Ekosistem Layanan:** Memfasilitasi kemitraan sekolah reguler-SLB sebagai resource center untuk supervisi pedagogik, asesmen fungsional, dan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI/IEP).
- **Pengembangan Kapasitas SDM:** Menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi guru kelas, GPK, dan kepala sekolah terkait Universal Design for Learning (UDL), manajemen kelas inklusif, asesmen alternatif, serta intervensi berbasis bukti. Skema micro-credential dan komunitas belajar guru mendorong kesinambungan praktik.
- **Akomodasi dan Sumber Daya:** Menjamin akomodasi yang layak (modifikasi kurikulum, waktu ujian tambahan, bahan braille, perangkat AT seperti screen reader, FM system) dan peningkatan aksesibilitas fisik (ramp, toilet aksesibel, penanda taktil).
- **Pendanaan Inklusif:** Mendorong alokasi anggaran berbasis kebutuhan melalui sinergi APBD, BOS/DAK, dan skema bantuan khusus PDBK, termasuk mekanisme pembiayaan untuk asesmen diagnostik dan layanan rujukan.
- **Tata Kelola dan Akuntabilitas:** Menetapkan indikator kinerja (enrolmen PDBK, retensi, kelulusan, transisi ke pendidikan lanjut/ketenagakerjaan), serta melakukan monitoring-evaluasi berkala dengan pelibatan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas.
- **Advokasi dan Sosialisasi:** Mengarusutamakan anti-stigma melalui kampanye publik, pelibatan orang tua, dan forum multipihak untuk memastikan penerimaan sosial di sekolah dan lingkungan.

Strategi Implementasi di Kalimantan Tengah Konteks geografis Kalimantan Tengah menuntut solusi adaptif: pengembangan model layanan satelit dan kunjungan berkala GPK ke sekolah-sekolah terpencil; pemanfaatan pembelajaran jarak jauh sinkron-asinkron untuk terapi dan bimbingan; serta pemenuhan transportasi pendidikan yang terjangkau. Dinas dapat memprioritaskan:

- **Pusat Sumber Provinsi:** SLB unggulan sebagai pusat pelatihan, peminjaman alat bantu, dan klinik asesmen.
- **Jejaring Layanan Lintas Sektor:** Kerja sama dengan dinas kesehatan, sosial, dan rumah sakit untuk skrining dini, terapi okupasi/wicara, dan rujukan.
- **Sistem Informasi Inklusif:** Dashboard provinsi untuk memantau profil PDBK, layanan yang diterima, dan capaian belajar, sesuai prinsip perlindungan data.

Tantangan dan Peluang Tantangan meliputi keterbatasan GPK, disparitas sumber daya antar wilayah, serta keterbatasan data. Namun, peluang hadir melalui kebijakan nasional yang

pro-inklusif, dukungan lembaga internasional, dan teknologi bantu yang makin terjangkau. Dengan tata kelola berbasis bukti dan pendanaan adaptif, peran bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan akses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat meningkat signifikan.

Rekomendasi

- Tetapkan standar layanan minimal inklusif provinsi yang mengikat kabupaten/kota.
- Bangun skema pengembangan profesional berkelanjutan untuk GPK dan guru reguler berbasis UDL.
- Kembangkan mekanisme pendanaan berbasis kebutuhan dan insentif bagi sekolah yang memperluas akses PDBK.
- Wajibkan PPI/IEP dan asesmen fungsional sebagai prasyarat penilaian.
- Implementasikan sistem data terintegrasi dan audit akomodasi layak setiap semester.

Penutup Penguatan mandat, kapasitas, dan tata kelola memungkinkan dinas pendidikan provinsi berperan sebagai katalis inklusi. Melalui perencanaan berbasis data, kolaborasi multipihak, dan pendanaan yang responsif, akses pendidikan bermutu bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Tengah dapat terwujud dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berperan krusial dalam menyediakan akses pendidikan yang adil dan setara bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebuah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Kemajuan dalam implementasi pendidikan inklusif, seperti peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan program inklusi dan pelatihan untuk para guru, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut mencakup kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam hal fasilitas fisik yang ramah disabilitas maupun dalam penyediaan materi ajar yang sesuai. Selain itu, stigma sosial yang sering kali melekat pada anak-anak penyandang disabilitas juga menjadi penghalang yang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang inklusif.

Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan mendukung perkembangan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kerjasama ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, sehingga anak-anak dengan disabilitas dapat diterima dan didukung dalam lingkungan belajar mereka. Selain itu, partisipasi aktif dari orang tua sangat penting untuk memfasilitasi proses pendidikan di rumah dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan sinergi antara semua pihak—pemerintah, sekolah, dan masyarakat—diharapkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat meningkat, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan meraih masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. (2020). *Pedoman Pendidikan Inklusif*.
- Smith, J. (2018). *Inclusion in Education: A Guide for Teachers*. New York: Routledge.

- Arifin, Z. (2019). *“Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Khusus di Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(1), 45-60.
- Sari, R. (2021). *“Stigma Sosial dan Pendidikan Inklusif: Tantangan dalam Implementasi.” Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(2), 123-135.